

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNN Kota Mataram sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Mataram adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Mataram.

2. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- b. Berkoordinasi dengan Kapolresta Mataram dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

4. Kewenangan

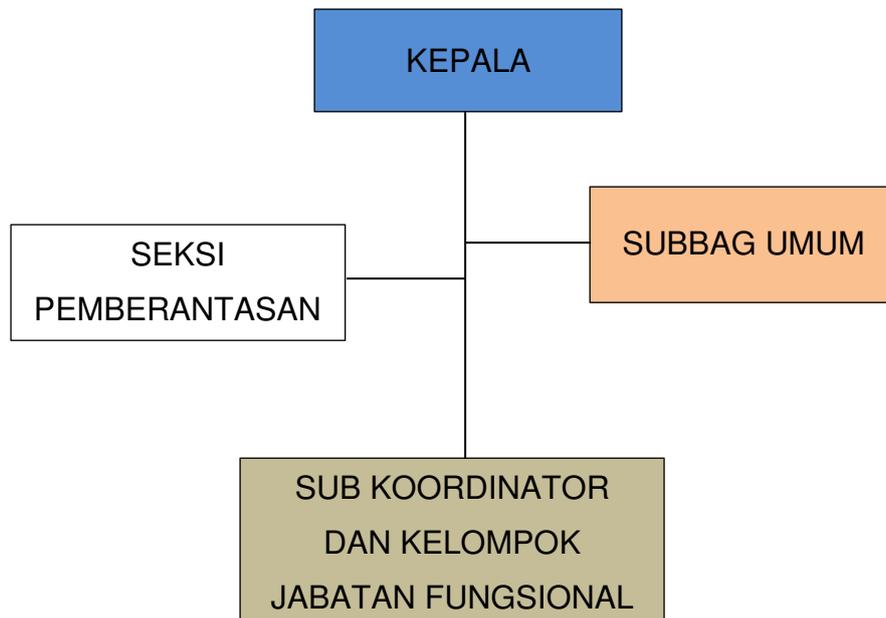
Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Mataram secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kota Mataram berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNN Kota Mataram : Ivanto Aritonang, ST
2. Kepala Sub Bagian Umum : Nurul Achyani, ST
3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BNN KOTA MATARAM



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Perencanaan Kinerja
 - Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Bab IV Penutup
- Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

BNN Kota Mataram sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2021 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNN Kota Mataram, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNN Kota Mataram dengan Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat.

Adapun Perjanjian Kinerja BNN Kota Mataram Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Kementerian/Lembaga : BNN Kota Mataram

Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | T a r g e t |
|----|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50,00 |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,67 |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipan | 3,41 |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | - |
| | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi | - |
| 5 | Meningkatnya kapasitas | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | - |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | - |
| 6 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional | 1 Lembaga |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Unit |
| 7 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram | 3.2 |
| 8 | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan | - |
| 9 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - |
| | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan | - |
| 10 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | - |
| | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | - |
| 11 | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dan prekursor narkoba | | |
| 12 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram | 90 |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | - |
| 13 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram | 94 |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | - |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BNN Kota Mataram merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Mataram Tahun 2021 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 8 (delapan) indikator. Dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sesuai target.**

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis tahun 2021 dan penjelasan hasil capaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | CAPAIAN (%) |
|----|--|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50,00 | 51,97 | 101,97% |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,67 | 97,054 | 118,384 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | CAPAIAN (%) |
|----|--|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba | | | | |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipan | 3,41 | 3,64 | 101% |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | - | - | - |
| | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi | - | - | - |
| 5 | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | - | - | - |
| | | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | - | - | - |
| 6 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100% |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Unit | 3 Unit | 300% |
| 7 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di | Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram | 3.2 | 3,277 | 101% |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | Klinik Rehabilitasi | | | | |
| 8 | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan | - | - | - |
| 9 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - | - | - |
| | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan | - | - | - |
| 10 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | - | - | - |
| | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | - | - | - |
| 11 | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - | - | - |
| 12 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram | 90 | 90,96 | 101% |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di | - | - | - |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | T a r g e t | Realisasi | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | efektif dan efisien | wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | | | |
| 13 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram | 94 | 98,63 | 104% |
| | | Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | - | - | - |

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

| | |
|----|---|
| 1. | Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba |
|----|---|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|----------|
| 1. | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50,00 | 51,97 | 101,97 % |

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNN

dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba

| Klasifikasi | Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba |
|---------------|--|
| Sangat rendah | ≤ 45.97 |
| Rendah | 45.98 – 49.73 |
| Tinggi | 49.74 – 53.50 |
| Sangat tinggi | ≥ 53.51 |

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 50,00 indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi sebanyak 51,97 atau sebesar 101,97%. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4154/XII/DE/PC.00/2021/BNN tanggal 7 Desember 2021 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021, hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai peraturan Kepala BNN RI Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024. dengan hasil sebagai berikut :

- a. Perhitungan dektari menggunakan aplikasi *mobile Dektari Aja* terhadap 57.437 remaja usia 12 - 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialiassi sebanyak 1.995 oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK.
- b. Hasil angka perhitungan Dektari tahun 2021 adalah 51,97 (kategori tinggi) dengan target angka 50 (kategori tinggi).

| NO | UNIT KERJA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET | REALISASI |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | BNNP NTB | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" (skala nilai 49,74-53,50) di wilayah provinsi | 50 | 46,69 |
| 2 | BNNK MATARAM | | | 50 | 51,97 |
| 3 | BNN KAB SUMBAWA BARAT | | | 50 | 50,84 |
| 4 | BNN KAB SUMBAWA | | | 50 | 52,31 |
| 5 | BNN KAB BIMA | | | 50 | 46,52 |
| TOTAL | | | | 2 Kab/Kota berkategori "Tinggi" | 3 Kab/Kota berkategori "Tinggi" |

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNN Kota Mataram", adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | $= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} \times 100\%$ | $= \frac{51,97}{50} \times 100\% = 103,94\%$ | $-\sum RLO =$ Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba $-\sum TLO =$ Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | Penyalahgunaan Narkotika |
|--|--|--|--|--------------------------|

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Peran aktif para penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan risikonya
2. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kondisi pandemi Covid-19 dengan varian barunya menjadikan pelaksanaan program P4GN melalui kegiatan intervensi tatap muka terhadap semua lingkungan sasaran terhambat, lingkungan pendidikan lebih fokus pada rekayasa kegiatan yang harus tetap menjalankan fungsi akademik.;
2. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
3. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN; dan
4. Pertanyaan dalam kuesioner dektari ambigu sehingga kesulitan dipahami oleh peserta.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. advokasi dan asistensi terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN;
2. menerapkan protokol kesehatan selama dan sesudah masa pandemi Covid 19 pada kegiatan pertemuan atau mengumpulkan massa;

3. perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui berbagai macam media dengan adanya varian baru pandemi covid-19;
4. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

| | |
|-----------|--|
| 2. | Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika |
|-----------|--|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|---|--------|-----------|--------------|
| 1. | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 78,67 | 97,054 | 118,384 % |

Definisi operasional dari indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkotika yang berasal dari internal maupun eksternal.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 78,67 indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika dapat terealisasi sebanyak 97,054 atau sebesar 118,384%. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN tanggal 20 Desember 2021 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2021, hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi

Tahun 2021 sesuai peraturan Kepala BNN RI Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024. dengan hasil sebagai berikut :

a. Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (kategori tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 - 100) sebanyak 65 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 - 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 - 76,60) sebanyak 641 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 - 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja.

| NO | UNIT KERJA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET | REALISASI |
|--------------|-----------------------|---|---|--|--|
| 1 | BNNP NTB | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" (skala nilai 76,61-88,30) di wilayah provinsi | 78,67 | 76,61 |
| 2 | BNNK MATARAM | | | 78,67 | 97,05 |
| 3 | BNN KAB SUMBAWA BARAT | | | 78,67 | 82,32 |
| 4 | BNN KAB SUMBAWA | | | 78,67 | 80,18 |
| 5 | BNN KAB BIMA | | | 78,67 | 82,59 |
| TOTAL | | | | 3 Kab/Kota berkategori "Tinggi" | 4 Kab/Kota berkategori "Tinggi" |

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNN Kota Mataram", adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|---|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | $= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} * 100\%$ | $= 97,054 / 78,67 * 100\% = 118,384\%$ | $= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba}}{\text{Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba}}$ |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. antusiasme orang tua murid pengembangan dari kegiatan dialog interaktif remaja sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN;
2. adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNN Kota Mataram.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing
3. Mengenal faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

| | |
|-----------|---|
| 3. | Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN |
|-----------|---|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--------------------------------|--------|-----------|------|
| 1. | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,4 | 3,64 | 101% |

Definisi operasional dari Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dihitung dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu Rapat Kerja, Workshop/Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) untuk mengukur output (jumlah program pemberdayaan), dengan kriteria:

- a. Sangat mandiri (3,26 – 4,00)
- b. Mandiri (2,51 – 3,25)
- c. Kurang Mandiri (IKP 1,76 – 2,50)
- d. Tidak Mandiri (IKP 1,00 – 1,75)

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3,4 indeks Kemandirian Partisipasi dapat terealisasi sebanyak 3,64 atau sebesar 101% berkategori sangat mandiri.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kemandirian Partisipasi BNN Kota Mataram”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | Indeks kemandirian Partisipasi | $= (\sum \text{RLO} / \sum \text{TLO}) * 100\%$ | $= 3,64 / 3,4 * 100\% = 101\%$ | - $\sum \text{RLO} =$ Jumlah Realisasi Indeks kemandirian Partisipasi - $\sum \text{TLO} =$ Jumlah Target Indeks kemandirian Partisipasi |

| NO | UNIT KERJA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET | REALISASI |
|--------------|-----------------------|--|---|---|---|
| 1 | BNNP NTB | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" (skala nilai 2,51-3,25) di wilayah provinsi | 3,51 | 3,53 |
| 2 | BNNK MATARAM | | | 3,41 | 3,64 |
| 3 | BNN KAB SUMBAWA BARAT | | | 3,40 | 3,40 |
| 4 | BNN KAB SUMBAWA | | | 3,42 | 3,42 |
| 5 | BNN KAB BIMA | | | 3,40 | 3,40 |
| TOTAL | | | | 4 Kab/Kota berkategori "Mandiri" | 4 Kab/Kota berkategori "Mandiri" |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Kegiatan sosialisasi bahaya Narkotika dan pelaksanaan tes urin yang dilakukan bahkan menggunakan anggaran mandiri;
2. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Berbagai kebijakan pemerintah baik terkait penganggaran dan pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi koordinasi dan sinergi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat bersama K/L, Pemda, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam

upaya revitalisasi dan pengembangan potensi masyarakat. Mengingat bentuk-bentuk kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat perlu adanya keterlibatan langsung atau kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan.;

2. Juknis pelaksanaan kegiatan baru dibagikan dipertengahan semester sehingga kegiatan tertunda;
3. Adanya pergantian kuesioner IKM baru diberikan di akhir tahun sehingga pelaksanaan monitoring harus menunggu kuesioner yang baru..

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Menginisiasi bersama K/L, Pemda, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam pengembangan berbagai alternatif pendekatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang tetap berupaya pada peningkatan keberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.;
2. Memaksimalkan kegiatan melalui sosial media dan kegiatan yang tidak banyak mengumpulkan massa; dan
3. Melaksanakan pendampingan dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.

| | |
|-----------|--|
| 4. | Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi |
|-----------|--|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|-----------|-----------|------|
| 1. | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 1 lembaga | 1 lembaga | 100% |

Definisi operasional dari jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan

kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional di Kota Mataram;
- b. fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 lembaga rehabilitasi yang operasional dapat terealisasi sebanyak 1 fasilitas atau sebesar 100%. Rincian pelaksanaan kegiatan Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika pada Kota Mataram pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi
- b. Koordinasi Kelembagaan Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Layanan Klinik Pratama
- d. Monitoring Fasilitas Rehabilitasi

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--|---|---------------------------|---|
| 1 | Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional | $= (\sum \text{RLO} / \sum \text{TLO}) * 100\%$ | $= (1/1) * 100\% = 100\%$ | - $\sum \text{RLO}$ = Jumlah Realisasi lembaga rehabilitasi yang operasional - $\sum \text{TLO}$ = Jumlah Target lembaga |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | rehabilitasi yang operasional |
|--|--|--|--|-------------------------------|

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. BNN Kota Mataram memiliki klinik pratama yang melayani rehabilitasi penyalahguna narkoba rawat jalan;
2. Mendorong layanan dengan merujuk klien dari hasil SIL dan atau setelah dilakukan assessment di klinik Pratama BNN Kota Mataram.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Klien tidak hadir dalam layanan rehabilitasi rawat jalan sesuai jadwal;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. melakukan koordinasi melalui rapat dan secara langsung dengan Dinas Kesehatan untuk dorongan layanan rehabilitasi pada fasilitas kesehatan dibawah binaannya;
2. sosialisasi rehabilitasi dan pascarehabilitasi oleh jejaring dinas kesehatan, puskesmas pembantu dan kader kesehatan;

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 2. | Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM | 1 unit | 3 unit | 300% |

Definisi operasional dari Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan

pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan kriteria yaitu : Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM dapat terealisasi sebanyak 3 unit atau sebesar 300%.

| NO | UNIT KERJA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET | REALISASI |
|--------------|-----------------------|---|---|---------------|----------------|
| 1 | BNNP NTB | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi | 1 Unit | 3 Unit |
| 2 | BNNK MATARAM | | | 1 Unit | 3 Unit |
| 3 | BNN KAB SUMBAWA BARAT | | | 1 Unit | 1 Unit |
| 4 | BNN KAB SUMBAWA | | | 1 Unit | 1 Unit |
| 5 | BNN KAB BIMA | | | 1 Unit | 6 Unit |
| TOTAL | | | | 5 Unit | 14 Unit |

| Satker Pembina | Nama IBM | Desa / Kelurahan |
|------------------|-------------------|------------------|
| BNN Kota Mataram | Bintaro | Ampenan |
| BNN Kota Mataram | Cakranegara Utara | Cakranegara |
| BNN Kota Mataram | Abiantubuh Baru | Sandubaya |

Rincian pelaksanaan kegiatan Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba di Unit Penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di BNN Kota Mataram pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan dan Koordinasi
- b. Pembentukan Unit IBM
- c. Supervisi dan Asistensi
- d. Operasional Unit IBM

e. Monitoring Rencana Aksi

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--|---|---------------------------|--|
| 1 | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | $= (\sum \text{RIBM} / \sum \text{TIBM}) * 100\%$ | $= (3/1) * 100\% = 300\%$ | $-\sum \text{RIBM} =$ Jumlah Realisasi unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM $-\sum \text{TLO} =$ Jumlah Target unit penyelenggara rehabilitasi IBM |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Telah terselenggaranya layanan IBM oleh AP pada 3 Kelurahan di Kota Mataram;
2. Dukungan Pemerintah Daerah dan para stakeholder dalam mendukung kegiatan IBM.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan menyesuaikan jadwal antara klien IBM dengan Agen Pemulihan untuk pelaksanaan layanan;
2. Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan tatap muka dan berkumpul.
3. Belum adanya dukungan anggaran kepada IBM.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. petugas Layanan Rehabilitasi BNN Kota Mataram memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia dan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM.;
2. tetap menjalin komunikasi antara petugas BNN Kota Mataram, perangkat Kelurahan, AP dan klien.
3. tetap melaksanakan monitoring terhadap unit IBM yang sudah terbentuk.

| | |
|-----------|--|
| 5. | Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi |
|-----------|--|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1. | Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram | 3,2 | 3,277 | 101% |

Definisi operasional dari Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram dengan kriteria yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Prosedur Pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3,2 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram dapat terealisasi sebanyak 3,277 atau sebesar 101%.

Rincian pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Pengumpulan Data;
- b. Pengumpulan Data dengan mengisi kuesioner melalui link yang diberikan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI untuk klien rehabilitasi Klinik BNN Kota Mataram;
- c. Analisis data yang dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI;
- d. Laporan Hasil Kajian Indeks Kepuasan Layanan

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik BNN Kota Mataram | $= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$ | $= (3,277 / 3,2) * 100\%$ $= 101\%$ | - $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram - $\sum \text{TIK}$ = Target Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik BNN Kota Mataram |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Korelasi terhadap sasaran strategis Deputy Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka Klien dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkoba. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Klinik Pratama BNN Kota Mataram memberikan hasil penanganan pemulihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan manfaatnya oleh klien pada khususnya dan keluarga pada umumnya.;
2. Tersedianya SDM yang cukup kompeten dan tersertifikasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi covid-19 selama tahun 2021 membatasi pertemuan konseling tatap muka terutama program konseling kelompok;
2. Beberapa klien masih bingung dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh sesuai kompetensinya di Klinik Pratama BNN Kota Mataram.
2. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Mataram.
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Mataram

| | |
|----|---|
| 6. | Sasaran : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien |
|----|---|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

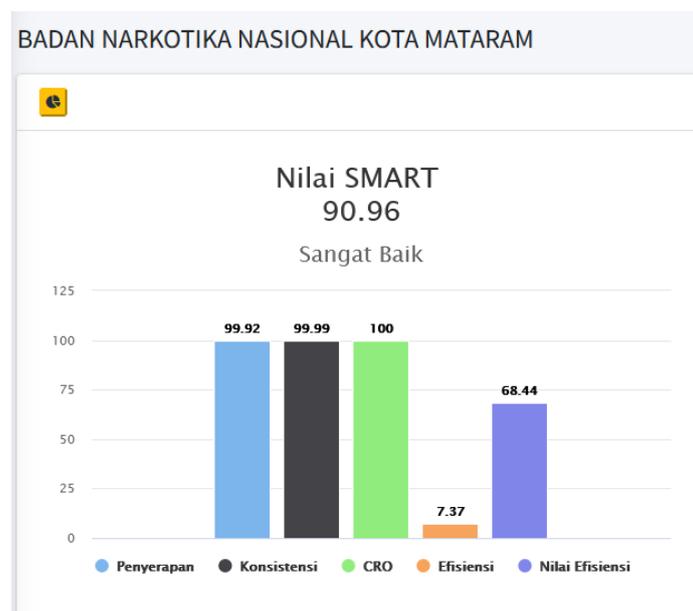
| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|----------------------------|--------|-----------|------|
| 1. | Nilai kinerja anggaran BNN | 90 | 90,96 | 101% |

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Kota Mataram adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Kota Mataram diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 90 untuk nilai kinerja anggaran BNN Kota Mataram dapat terealisasi sebesar 90.96 atau sebesar 101%.

Hasil yang diperoleh BNN Kota Mataram tahun 2021 adalah 90,96% (kriteria "Sangat Baik"). Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Capaian dari Aplikasi Smart Kemenkeu RI, dengan detail hasil pengukuran sebagai berikut:



| NO | UNIT KERJA | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET | REALISASI |
|--------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------|
| 1 | BNNP NTB | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN | 90 | 90,87 |
| 2 | BNNK MATARAM | | | 90 | 90,96 |
| 3 | BNN KAB SUMBAWA BARAT | | | 90 | 90,24 |
| 4 | BNN KAB SUMBAWA | | | 90 | 90,62 |
| 5 | BNN KAB BIMA | | | 90 | 90,05 |
| TOTAL | | | | 90 | 90,55 |

Formula yang digunakan untuk mengukur terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1. | Nilai Kinerja Anggaran BNN | $=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$ | $=(90,96/90) * 100\%$ $=101\%$ | - $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran BNN |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan strategis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.

2. Koordinasi yang baik antara Staf Pelaksana bagian Perencanaan dengan Kasubbag Umum, Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi dan Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan yang sulit terlaksana segera direvisi anggarannya untuk digunakan pada kegiatan memungkinkan untuk dilaksanakan dan anggarannya dapat di serap maksimal.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian penyusunan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran yang sulit terealisasi khususnya pada triwulan II.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyesuaikan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran supaya anggaran dapat terserap maksimal.

| | |
|-----------|--|
| 7. | Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur |
|-----------|--|

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram | 94 | 98,63 | 104% |

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian

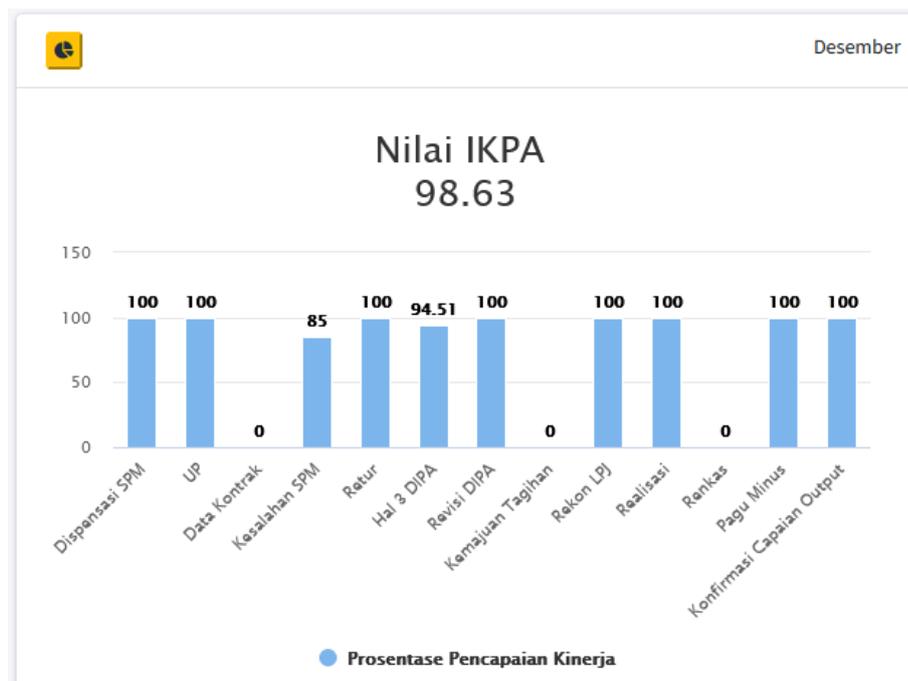
Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 94 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Mataram dapat terealisasi sebesar 98,63 atau sebesar 104%.



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram”, adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Formula | Hasil Perhitungan | Keterangan |
|-----|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram | $= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$ | $= (98,63/94) * 100\%$ $= 104\%$ | - \sum RNK = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - \sum TNK = Jumlah Target Nilai IKPA |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Adanya dukungan dari Kepala BNN Kota Mataram dan Stakeholder terkait serta dari masyarakat dalam melaksanakan dan menyukseskan program

manajemen dan program P4GN sehingga pencapaian realisasi melebihi dari target yang diinginkan diperoleh.

2. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker setiap Triwulan dengan subbag/seksi bertujuan melakukan diskusi/pembahasan secara intensif dan terbuka sehingga identifikasi permasalahan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran satker kedepannya

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi dalam melaporkan hasil kegiatan perencanaan
2. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga menugaskan staff pelaksana perencanaan yang merupakan PNS dengan jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Mengintegrasikan semua aplikasi pada beberapa K/L yang mengakomodir hasil kegiatan perencanaan supaya tidak banyak melaporkan hasil kegiatan yang sama pada beberapa aplikasi perencanaan.
2. Menambah jumlah PNS atau PPNPN pada lingkungan satker BNN Kabupaten/Kota yang membidangi bagian perencanaan agar lebih fokus pada tugas pokok fungsinya.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 BNN Kota Mataram mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.527.903.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | PROGRAM | PAGU | REALISASI | % | SISA | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | 896.426.000 | 896.426.000 | 100 | - | - |
| 2 | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 631.477.000 | 630.269.250 | 99,8 | 1.207.750 | 0,2 |
| TOTAL | | 1.527.903.000 | 1.526.695.250 | 99.92 | 1.207.750 | 0,08 |

Adapun rincian realisasi anggaran BNN Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

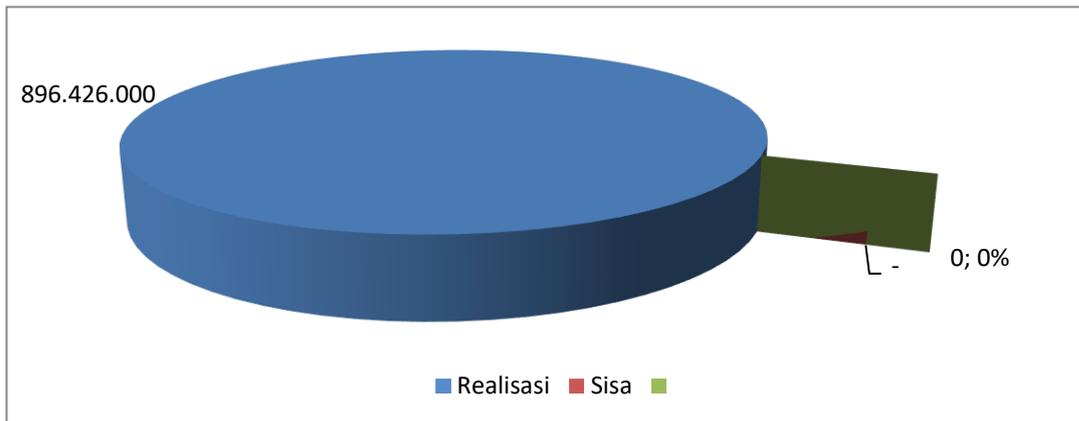
| Kode Bagian | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | | | | OUTPUT | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | PAGU | REALISASI | % | SISA | TARGET | REALISASI | % | SATUAN |
| BAGIAN UMUM | | 896.426.000 | 896.426.000 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| 3236.EAA | Layanan Perkantoran | 68.475.000 | 68.475.000 | 100,00 | - | 1 | 1 | 100 | Layanan |
| 3236.EAC | Layanan Umum | 2.550.000 | 2.550.000 | 100,00 | - | 1 | 1 | 100 | Layanan |
| 3237.EAF | Layanan SDM | 10.844.000 | 10.844.000 | 100,00 | - | 14 | 14 | 100 | Orang |
| 3238.EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 1.920.000 | 1.920.000 | 100 | - | 1 | 1 | 100 | Layanan |
| 3238.EAL | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 4.310.000 | 4.310.000 | 100,00 | - | 1 | 1 | 100 | Laporan |
| 3239.EAA | Layanan Perkantoran | 712.473.000 | 712.473.000 | 100,00 | - | 1 | 1 | 100 | Layanan |
| 3239.EAC | Layanan Umum | 51.771.000 | 51.771.000 | 100 | - | 2 | 2 | 100 | Layanan |
| 3239.EAD | Layanan Sarana Internal | 25.583.000 | 25.583.000 | 100 | - | 5 | 5 | 100 | Unit |
| 3979.EAI | Layanan Kehumasan dan Protokoler | 18.500.000 | 18.500.000 | 100 | - | 1 | 1 | 100 | Layanan |
| BIDANG P2M | | 406.325.000 | 406.779.000 | 99,96 | 150.000 | - | - | - | - |
| 3247.UBB | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa | 17.630.000 | 17.630.000 | 100,00 | - | 2 | 2 | 100 | Desa |
| 3247.BDE | Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga | 35.950.000 | 35.950.000 | 100,00 | - | 5 | 5 | 100 | Keluarga |
| 3257.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 230.580.000 | 230.430.000 | 99,93 | 150.000 | 4 | 4 | 100 | Lembaga |
| 5936.ODC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 122.789.000 | 122.789.000 | 100,00 | - | 10 | 10 | 100 | Orang |
| BIDANG REHABILITASI | | 204.323.000 | 203.865.500 | 99,88 | 1.057.500 | - | - | - | - |
| 3259.ADG | Standarisasi Profesi dan SDM | 12.790.000 | 12.790.000 | 100,00 | - | 5 | 5 | 100 | Orang |
| 3260.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 144.443.000 | 143.735.500 | 99,51 | 707.500 | 3 | 3 | 100 | Lembaga |
| 3260.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PNPB | 21.000.000 | 20.850.000 | 98,33 | 350.000 | 105 | 105 | 100 | Orang |
| 3260.BDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 26.690.000 | 26.690.000 | 100,00 | - | 1 | 1 | 100 | Kelompok Masyarakat |
| BIDANG PEMBERANTASAN | | 19.625.000 | 19.625.000 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| 3258.BIB | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | 19.625.000 | 19.625.000 | 100,00 | - | 5 | 8 | 160 | Orang |
| TOTAL SELURUHNYA | | 1.527.903.000 | 1.526.695.500 | 99,92 | 1.207.500 | 167 | 170 | 102 | - |

Anggaran BNN Kota Mataram Tahun 2021 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp 896.426.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 896.426.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 896.426.000,- (100%), sisa anggaran sebesar Rp. -.

Grafik 1. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen

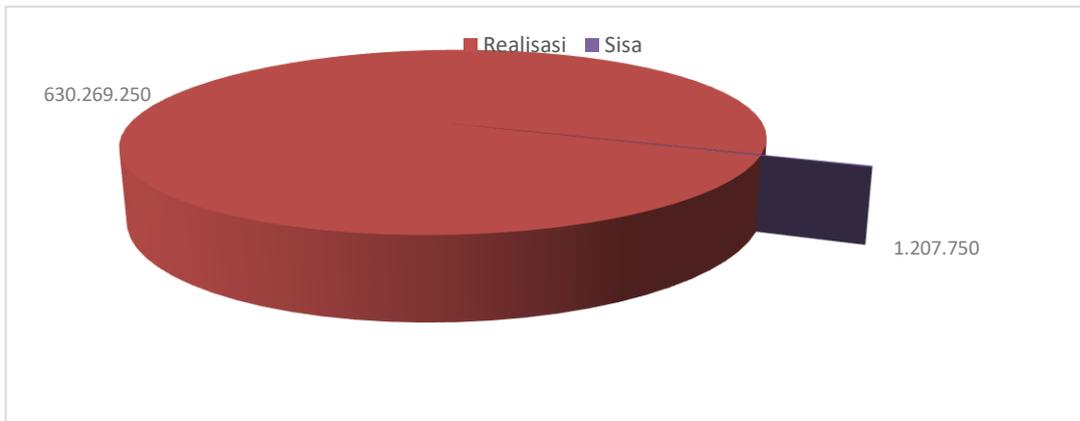


2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 631.477.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 631.477.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 630.269.250,- (99,8%), sisa anggaran sebesar Rp. 1.207.750,- (0,2%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya pengembalian atas temuan tahun berjalan kegiatan Seksi P2M dan Seksi Rehabilitasi dan PNBP pada Seksi Rehabilitasi. Adapun sisa anggaran dari kegiatan Seksi P2M adalah transport dalam kota kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, kemudian kegiatan Seksi Rehabilitasi pada PNBP dan pelaksanaan fasilitas dan pembinaan lembaga.

Grafik 2. Realiasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Mataram Tahun 2021, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Mataram sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Mataram telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar BNN Kota Mataram yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Mataram dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Mataram pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 7 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Mataram.

2. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNN Kota Mataram tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Urutan | Jumlah IKK | Rentang Capaian | % |
|---------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| I. | 6 | Capaian $\geq 100\%$ | 75% |
| II. | 2 | $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$ | 25% |
| III. | 0 | $70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$ | 0% |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|----|
| IV. | 0 | Capaian < 70% | 0% |
| V. | 0 | NA (<i>Not Available</i>) | 0% |

3. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNN Kota Mataram tahun anggaran 2021 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 99,92 dengan kriteria “Sangat Baik”.

4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- c. Meningkatkan kualitas SDM pegawai BNN Kota Mataram melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
- e. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monev* dan *e-lkip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA MATARAM DENGAN BNNP NTB TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivanto Aritonang, S.T.
Jabatan : Kepala BNN Kota Mataram

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Mataram, Maret 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Mataram

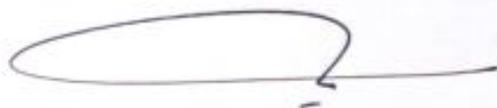
Ivanto Aritonang, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN KOTA MATARAM**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 50,00 |
| 2 | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 78,67 |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,41 |
| 4 | Meningkatnya upaya pemulihian kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di intervensi | - |
| 5 | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 1 Lembaga |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM | 1 Unit |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi | Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mataram | 3,2 |
| 7 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | - |
| 8 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mataram | 90 |
| 9 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mataram | 94 |

| | | |
|--|----|-------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp | 122.769.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp | 53.580.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Rp | 230.580.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Rp | - |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp | 12.790.000 |
| 6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp | 171.133.000 |
| 7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Rp | - |
| 8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp | - |
| 9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp | 77.555.000 |
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp | 10.844.000 |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp | 6.230.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana | Rp | 783.297.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolian | Rp | 18.500.000 |

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si

Mataram, Maret 2021
 Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Mataram



Ivanto Aritonang, S.T.

LAMPIRAN II : HASIL PERHITUNGAN DEKTARI DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2021



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4/54 /XII/DE/PC.00/2021/BNN Jakarta, 7 Desember 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri
Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
(Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021

Kepada:

Yth. 1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

di

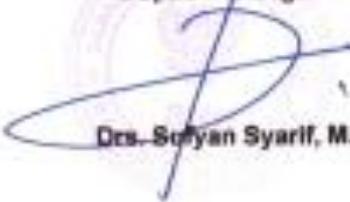
Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - e. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024.
 - f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja, 2020. Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
 - g. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitugan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.
 - h. Surat Perintah Kepala BNN RI Nomor: Sprin/ 880/ III/ DE/ PC.00/ 2021/ BNN tanggal 17 Maret 2021 tentang Daftar Nama Narahubung Aplikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja
 - i. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/a. Perhitungan

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap 57.437 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak 1.995 oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah 51,02 (Kategori Tinggi) dengan target angka 51 (Kategori Tinggi), adapun klasifikasi hasil capaian wilayah sebagai berikut:
 - 1) Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 58 Satker;
 - 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 66 Satker;
 - 3) Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 79 Satker;
 - 4) Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 4 Satker ;Daftar Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam proses penghitungan Dektari Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
 4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



Drs. Sofyan Syarif, M.H.

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Perencanaan Settama BNN

| NO | UNIT VERTIKAL | NILAI DEKTARI | KATEGORI |
|----|--|---------------|----------------------|
| | <i>Baseline 2018</i> | 57.26 | Sangat Tinggi |
| 30 | BNNP NUSA TENGGARA BARAT | 49.69 | Rendah |
| | BNN KABUPATEN BIMA | 46.52 | Rendah |
| | BNN KOTA MATARAM | 51.97 | Tinggi |
| | BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 50.84 | Tinggi |
| | BNN KABUPATEN SUMBAWA | 52.31 | Tinggi |
| | DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 50.27 | Tinggi |
| | <i>Baseline 2018</i> | 47.79 | Rendah |

LAMPIRAN III : HASIL PERHITUNGAN DEKTARA DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2021



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871586, 80871587

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : Br/4073/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Jakarta, 20 Desember 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga
Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara)
Direktorat Advokasi Tahun 2021

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala BNNP;
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
 - f. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 65 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 41 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



Drs. Sufyan Syarif., M.H

Tembusan :

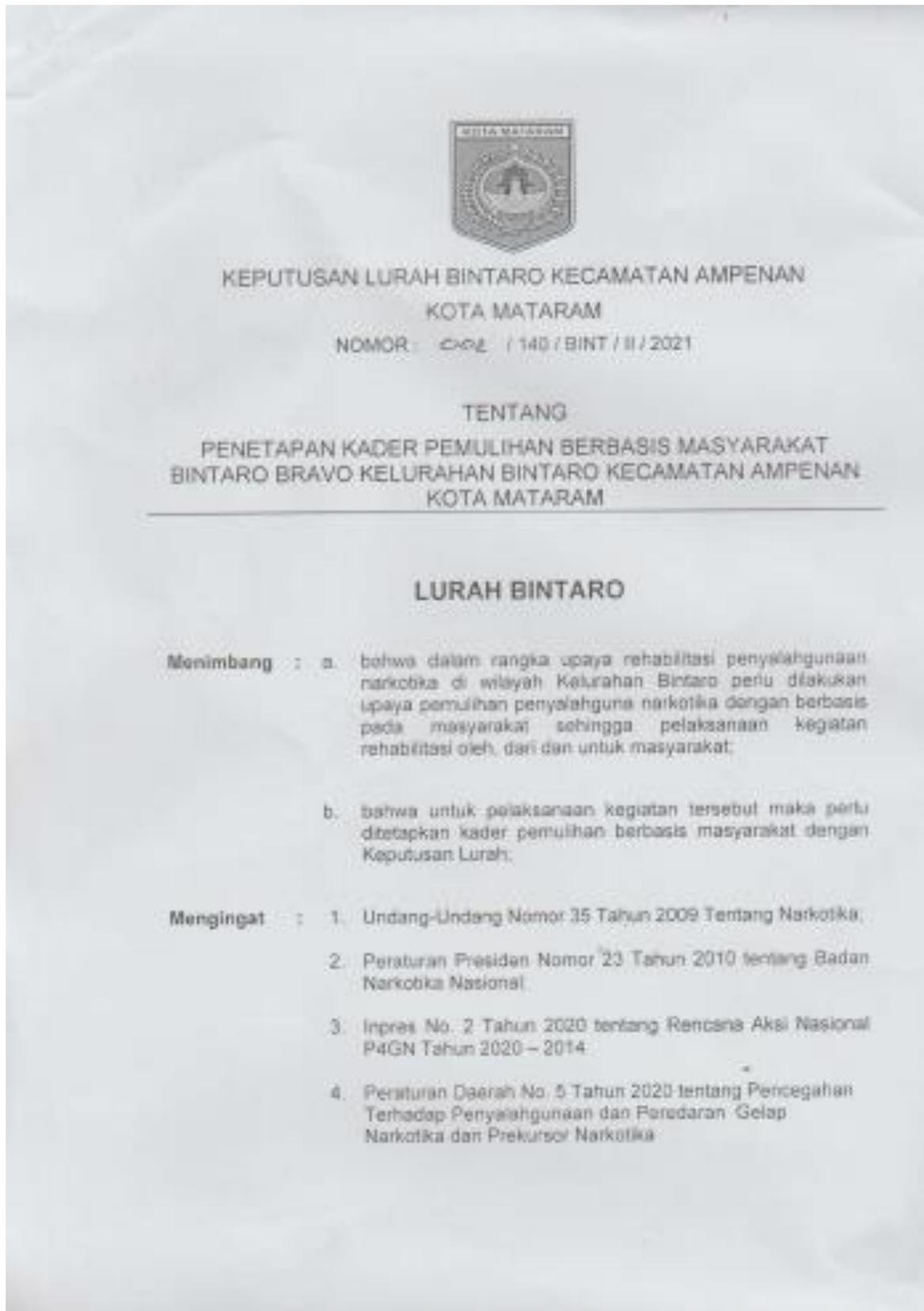
1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/1325/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

| NO | SATUAN KERJA | NILAI DEKTARA | KATEGORI |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
| 147 | BNN KOTA SAMARINDA | 76,607 | RENDAH |
| 148 | BNN KOTA BONTANG | 75,357 | RENDAH |
| 149 | BNNP NUSA TENGGARA BARAT | 76,607 | RENDAH |
| 150 | BNN KABUPATEN BIMA | 82,589 | TINGGI |
| 151 | BNN KOTA MATARAM | 97,054 | SANGAT TINGGI |
| 152 | BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 82,321 | TINGGI |
| 153 | BNN KABUPATEN SUMBAWA | 80,179 | TINGGI |

LAMPIRAN IV : IBM DI KOTA MATARAM TAHUN 2021



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT BINTARO BRAVO KELURAHAN BINTARO KEC. AMPENAN KOTA MATARAM.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat sebagai Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat Bintaro Bravo Kelurahan Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram.

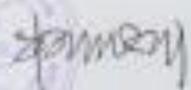
KEDUA : Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat (Kader PBM) sebagaimana yang dimaksud pada point ke satu adalah seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 02 Februari 2021

LURAH BINTARO


SYAMSUL IRAWAN, S.STP.
NIP. 19771029 199612 1 001

Lurah Bintaro Kecamatan Ampenan
Kota Mataram

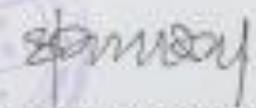
Lampiran Surat Keputusan Lurah Bintaro
Nomor : 002 / 140 / BINT / II / 2021
Tanggal : 02 Februari 2021

**DAFTAR NAMA KADER PEMULIHAN BERBASIS
MASYARAKAT BINTARO BRAVO
KELURAHAN BINTARO KECAMATAN AMPENAN
KOTA MATARAM**

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|-----------------|-------------------|--|
| 1. | Emmy Sulstiwati | Koordinator Kader | Jln. Leuser B.8 BTN Pakel Gunung Sari |
| 2. | Suherman | Kader | Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram |
| 3. | Taufik Hidayat | Kader | Lingkungan Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram |
| 4. | Solihin,SH | Kader | Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram |

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 02 Februari 2021

PIL. LURAH BINTARO
KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM


SYAMSUL IRAWAN, S.STP.
NIP. 19771029 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA MATARAM
KECAMATAN SANDUBAYA
KELURAHAN ABIANTUBUH BARU
Jalan Probu Bangkasari No. – Telp. 0370 - 672901 Abiantubuh Mataram

KEPUTUSAN LURAH ABIANTUBUH BARU

KOTA MATARAM

NOMOR : 18/Kel – Ab/IV/ 2021

TENTANG

**PENETAPAN KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT
LINGKUNGAN GEDUR KELURAHAN ABIANTUBUH BARU KOTA MATARAM**

LURAH ABIANTUBUH BARU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayah kelurahan Abiantubuh Baru perlu dilakukan upaya pemulihan penyalahguna narkoba dengan berbasis pada masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi oleh, dari dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu ditetapkan kader pemulihan berbasis masyarakat dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
 - 3. Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 – 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT LINGKUNGAN GEDUR KELURAHAN ABIANTUBUH BARU
- KESATU :** Menunjuk dan mengangkat sebagai Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat di lingkungan Gedur Kelurahan Abiantubuh Baru
- KEDUA :** Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat (Kader PBM) sebagaimana yang dimaksud pada point ke satu adalah seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : April 2021


IRWAN HIDAYAT, SE.
NIP. 19741229 200312 1 004

Lurah Abiatubuh Baru
Kota Mataram

Lampiran Surat Keputusan Lurah
Nomor: 18/Kel – Abi/W/2021
Tanggal: April 2021

**DAFTAR NAMA KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT
LINGKUNGAN GEDUR KELURAHAN ABIANTUBUH BARU KOTA MATARAM**

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|-----------------------------|--|--------|
| 1. | I GUSTI AYU LINGSAR WINARDI | Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat | GEDUR |
| 2. | NI NENGAH YUNI ARTINI | Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat | GEDUR |

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal April 2021

LURAH ABIATUBUH BARU
KELURAHAN SANDUBAYA
KOTA MATARAM



IRWAN HIDAYAT, SE
NIP. 197412292003121004



PEMERINTAH KOTA MATARAM
KECAMATAN CAKRANEGARA
KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA
Jl. Gora Nomor 27 Telp. (8174) 437143

KEPUTUSAN LURAH CAKRANEGARA UTARA
KECAMATAN CAKRANEGARA
KOTA MATARAM
NOMOR : *014 / CU / II / 2021*

TENTANG
PENETAPAN KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA KECAMATAN CAKRANEGARA
KOTA MATARAM

LURAH CAKRANEGARA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayah kelurahan Cakranegara Utara perlu dilakukan upaya pemulihan penyalahguna narkoba dengan berbasis pada masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi oleh, dan untuk masyarakat,
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu ditetapkan kader pemulihan berbasis masyarakat dengan Keputusan Lurah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 – 2014
 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KADER PEMULIHAN BERBASIS MASYARAKAT CAKRANEGARA UTARA BERSATU KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA KEC. CAKRANEGARA KOTA MATARAM

KESATU : Menunjuk dan mengangkat sebagai Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat Cakranegara Utara Bersatu Kelurahan Cakranegara Utara Kec. Cakranegara Kota Mataram

KEDUA : Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat (Kader PBM) sebagaimana yang dimaksud pada point ke satu adalah seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 02 Februari 2021


LURAH CAKRANEGARA UTARA
KELURAHAN
CAKRANEGARA UTARA
IGDE SWECA S.Sos
NIP. 19651002 198903 1 020

LAMPIRAN IV : PERHITUNGAN IKLM TAHUN 2021

INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM) 2021: Rawat Jalan

| No. Urut | Persyaratan | | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | | Waktu Pelayanan | | Biaya/tarif | | Produk, Spesifikasi Jenis Layanan | | Kompetensi Pelaksana | | | Perilaku Pelaksana | | | Penanganan Pengaduan, Saran | | | Sarana dan Prasarana | |
|-------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Skor Total | 140 | 115 | 118 | 130 | 131 | 131 | 130 | 131 | 137 | 134 | 112 | 136 | 126 | 121 | 126 | 137 | 129 | 117 | 135 | 120 | |
| Batas-batas | 3.590 | 2.949 | 3.026 | 3.333 | 3.359 | 3.359 | 3.333 | 3.359 | 3.513 | 3.436 | 2.872 | 3.487 | 3.231 | 3.103 | 3.231 | 3.308 | 3.000 | 3.462 | 3.077 | | |
| Rerata Tiap Unsur | 3.269 | | 3.239 | | 3.346 | | 3.436 | | 3.154 | | 3.274 | | 3.372 | | 3.154 | | | 3.269 | | | |
| IKM | 3.277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IKM | 81,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nilai Interval (25-100) | Nilai Interval (1-4) | Mutu | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------|----------------------|------|------------------------|
| 85.31 - 100.00 | 3.533 - 4.00 | A | Sangat baik |
| 76.61 - 88.30 | 3.065 - 3.532 | B | Baik |
| 65.00 - 76.60 | 2.600 - 3.064 | C | Kurang baik |
| 25.00 - 64.99 | 1.000 - 2.599 | D | Tidak baik |

